

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran masyarakat atau yang disebut dengan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan yang diberikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya Undang Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan Indonesia. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah Daerah. Penerapan Undang-undang tersebut telah mengubah system pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang awalnya pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan

pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah di dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Namun, pada saat ini pendapatan dari sektor pajak masih kurang memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Efektifitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dimana pajak bumi dan bangunan mempunyai target yang harus dicapai. Penetapan target pajak bumi dan bangunan diatur oleh pemerintah daerah. Sedangkan kontribusi suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Pajak bumi dan Bangunan juga bisa dikontribusikan dalam sumber pendapatan asli daerah sehingga pencapaian target yang diperoleh sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian tentang pajak bumi dan bangunan telah banyak dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Rhima (2012) yang meneliti tentang efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah di kabupaten Gresik periode 2007-2011 yang memperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari

100%. Sedangkan Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi kota Surabaya karena pertimbangan banyaknya sumber daya alam yang tinggi dan didukung oleh banyaknya bangunan ataupun perusahaan besar yang berada di kota Surabaya. Kota Surabaya juga merupakan kota pertama atas pengalihan pengelolaan penerimaan dari sector PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 mengandung implikasi wewenang dan tanggungjawab penuh bagi Pemerintah Surabaya untuk mengelola PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam Tugas Akhir ini, maka akan diberikan pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan perlakuan evaluasi terhadap kondisi dari data yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul kemudian dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

2. Efektifitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapaitujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan.

3. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya pendapatan asli daerah.

4. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

5. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2011:101) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah . Kelompok asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat merumuskan masalah latar sebagai berikut:

- 1 Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis dapat menuliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan diadakan penelitian ini, dapat memperoleh manfaat-manfaat antara lain yaitu :

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya

- a. Penelitian digunakan sebagai referensi oleh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya atau mahasiswa lain di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya
- b. Penelitian digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan khususnya bagi mahasiswa Diploma III STIE Perbanas Surabaya dalam menyusun laporan Tugas Akhir

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah .Serta sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas atau penelitian serupa dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam pembangunan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan agar cepat terealisasikan dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan pendapatan daerah sendiri.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sumber Data

Dalam pengambilan data, penulis mengambil dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer yang penulis peroleh selama penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung di Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh data aktual mengenai efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah kota Surabaya

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis peroleh selama penelitian yaitu metode kepustakaan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur artikel, jurnal – jurnal buku, Undang – Undang maupun bahan kuliah yang berhubungan dengan topik.

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

Guna mempermudah dan membatasi pembahasan agar tidak terjadi kekeliruan, maka ruang lingkup penelitian mencakup data-data utama yang terkait dengan efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara mempelajari dan mengamati keadaan yang berhubungan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir sehingga dapat dijadikan landasan dalam pemecahan masalah. Seperti contoh mengenai tata cara penentuan

target terhadap pajak bumi dan bangunan, serta mengamati prosentase kontribusi pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Surabaya

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu divisi pendapatan asli daerah dan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang berada di Dinas Pendapatan Keuangan Kota Surabaya mengenai kendala dan upaya yang dilakukan DPPK dalam rangka optimalisasi Penerimaan PBB Perkotaan.

3. Dokumenter

Untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, data target pajak bumi dan bangunan, dan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah